

**TINDAK LANJUT TERHADAP PENERAPAN ELEKTRONIK VOTING
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**BENI WILLIA SAPUTRA
B10017063**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan Elektronik Voting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. Elektronik Voting adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara dan memelihara serta menghasilkan jejak audit. Elektronik voting akan dikaji untuk dapat diterapkan dalam pelaksanaan pada skala Pemilihan Umum Kepala Daerah demi tercapainya efektivitas dan efisiensi Pemilihan, selain itu dapat meminimalkan biaya penyelenggaraan, mempersingkat waktu pemungutan hingga proses penghitungan suara, dan masih ada beberapa keuntungan lain yang dapat di capai dari penerapan Elektronik Voting ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tindak lanjut pengaturan yuridis terhadap penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apa problematika hukum penerapan *e-voting* dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Tipe penelitiann yang digunakan ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah terjadinya kekosongan hukum untuk menerapkan sistem Elektronik Voting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah karena belum adanya peraturan KPU yang akan dijadikan landasan untuk menerapkan sistem Elektronik Voting ini, selain itu sistem ini juga perlu dikaji kembali untuk diterapkan karena masih ada beberapa kelemahan didalam proses penerapannya yang memungkinkan akan menghambat kesuksesan pelaksanaannya.

Kata Kunci: *Penerapan Elektronik Voting, Pemilihan Umum Kepala Daerah.*